

**PENGARUH PELAKSANAAN PRINSIP-PRINSIP
GOOD GOVERNANCE TERHADAP EFEKTIVITAS KERJA
PEGAWAI KANTOR UNIT PELAYANAN TERPADU VI DINAS
PENDAPATAN DAERAH KOTA MEDAN**

Ovi Aldino Akbar Nasution

Email : ovialdinoakbarnst@student.usu.ac.id

Jl. Dr. Sofyan No 1 Kampus FISIP USU Departemen Ilmu Administrasi Negara
Universitas Sumatera Utara

Diterima 8 Juni 2015/ Disetujui 23 Juni 2015

Abstract

The formulation of the problem in this research is "How to influence the implementation of the principles of Good Governance Effectiveness Against Employee Work Integrated Service Unit VI office of the Regional Revenue Office Terrain". This research was conducted at the office of the Integrated Service Unit VI Regional Revenue Office staff Medan. Populasi study were all employees of the Office of Integrated Services Unit VI Regional Revenue Office Medan. Sample set as many as 51 people consisting of staff and honorary Office of Integrated Services Unit VI Regional Revenue Office Medan. Mechanical Analysis of the data is carried out by quantitative descriptive analysis, and the relationship between the variables used untuk mengetahui Correlation analysis Product Moment Pearson. The results of this study is that the implementation of the principles Good Governance in the Office of Integrated Services Unit VI Regional Revenue Office Medan categorized either

Keyword: influence, good governance, effectiveness, employee.

Abstrak

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah " Bagaimana pengaruh pelaksanaan prinsip-prinsip Good Governance Terhadap Efektivitas Kerja Pegawai di Kantor Unit Pelayanan Terpadu VI Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan ". Penelitian ini dilakukan di Kantor Unit Pelayanan Terpadu VI Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan. Populasi penelitian adalah seluruh staff pegawai Kantor Unit Pelayanan Terpadu VI Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan. Sample ditetapkan sebanyak 51 orang yang terdiri dari staff dan honorer Kantor Unit Pelayanan Terpadu VI Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan. Teknik Analisa data yang dilakukan adalah dengan analisis deskriptif kuantitatif, dan untuk mengetahui hubungan antara variabel digunakan analisis Korelasi Product Moment Pearson. Adapun hasil-hasil penelitian ini adalah bahwa Pelaksanaan prinsip-prinsip Good Governance di Kantor Unit Pelayanan Terpadu VI Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan dikategorikan baik.

Kata kunci : Pengaruh, Pemerintahan yang baik, Efektivitas kerja, Pegawai.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara kesatuan, dalam pelaksanaan pemerintahan selalu menempatkan kebutuhan masyarakat sebagai tujuan. Pemerintah selalu berupaya melakukan perbaikan-perbaikan yang

dianggap perlu dalam sistem pemerintahan. Dalam kurun waktu satu dekade terakhir pemerintah mengacu pada sistem yang bersifat desentralisasi setelah sebelumnya sistem dijalankan dengan sentralisasi. Alur kerja birokrasi yang dahulu kaku dirubah menjadi lebih

fleksibel dan berorientasi terhadap pelayanan publik yang lebih baik.

Hakekat dari pelayanan publik adalah meningkatkan mutu dan produktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah di bidang pelayanan umum. Untuk mendorong upaya mengefektifkan sistem dan tatalaksana pelayanan, sehingga pelayanan umum dapat diselenggarakan secara lebih berdaya guna dan berhasil guna, dan juga untuk mendorong tumbuhnya kreativitas, prakarsa dan peran serta masyarakat dalam pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas.

Salah satu pemikiran yang kemudian dilaksanakan adalah "*Good Governance*" yaitu penyelenggaraan pemerintah negara yang bersih atau pemerintahan yang baik. Dengan demikian setiap pemerintahan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah membutuhkan sumber daya manusia yakni aparatur pemerintahan yang mampu mewujudkan karakteristik *good governance*.

Jika mengacu pada program World Bank dan United Nation Development Program (UNDP), orientasi pembangunan sektor publik adalah untuk menciptakan *good governance*. Pengertian *good governance* sering diartikan sebagai pemerintahan yang baik. Gunawan Sumodiningrat (1999: 251) menyatakan *good governance* adalah upaya pemerintahan yang amanah dan untuk menciptakan *good governance* pemerintahan perlu didesentralisasi dan sejalan dengan kaidah penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Unit Pelaksana Teknis VI Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Medan adalah salah satu dinas Pemerintah sebagai mitra pemerintah daerah Propinsi Sumatera Utara dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah

serta merupakan unsur pelaksanaan asas desentralisasi. Maka dalam rangka menciptakan *Good Governance*, Unit Pelaksana Teknis VI Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Medan sebagai pelaksana teknis dari Dinas Pendapatan Daerah sangat berperan penting, dengan pengertian lain Unit Pelaksana Teknis VI Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Medan harus menjadi suatu organisasi yang efektif.

Salah satu faktor untuk terselenggaranya proses pelayanan publik yang efektif adalah dengan menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance* yakni akuntabilitas, transparansi, Fairness atau keadilan, responsivitas atau ketanggapan

TELAAH PUSTAKA

Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut, perlu mengemukakan teori-teori sebagai kerangka berfikir untuk menggambarkan dari sudut mana penelitian menyoroti masalah yang dipilih. Singarimbun (1995:37) menyebutkan teori adalah serangkaian asumsi, konsep dan konstruksi, definisi dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep. Dalam penelitian ini yang menjadi kerangka teori adalah :

Pengertian *Good Governance*

Istilah *Good Governance* berasal dari induk bahasa Eropa, Latin, yaitu *Gubernare* yang diserap oleh bahasa Inggris menjadi *govern*, yang berarti *steer* (menyetir, mengendalikan), *direct* (mengarahkan), atau *rule* (memerintah). Penggunaan utama istilah ini dalam bahasa Inggris adalah *to rule with authority*, atau memerintah dengan kewenangan.

Governance pada dasarnya pertama kali digunakan adalah di dunia usaha atau korporat. Manajemen profesional yang diperkenalkan pasca

perang dunia II dengan prinsip dasar “memisahkan kepemilikan dengan pengelolaan” benar-benar menjadikan setiap korporat menjadi usaha-usaha yang besar, sehat dan menguntungkan. Gerakan ini dimulai secara besar-besaran di Amerika, khususnya setelah para titians entrepreneur mengalami kegagalan besar memertahankan kebesaran untuk mempertahankan kebesaran bisnisnya. Salah satu contohnya adalah Henry Ford II gagal mempertahankan kebesaran bisnisnya karena ia tidak mengenal manajemen professional

Prinsip-Prinsip Good Governance

Berdasarkan pengertian Good Governance oleh Mardiasmo dan Bank Dunia yang disebutkan di atas dan sejalan dengan tuntutan reformasi yang berkaitan dengan aparatur Negara termasuk daerah adalah perlunya mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas, dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan maka menuntut penggunaan konsep Good governance sebagai pemerintahan yang baik relevan dan berhubungan satu dengan lainnya. Ide dasarnya sebagaimana disebutkan Tangkilisan (2005:116) adalah bahwa Negara adalah institusi yang legal formal dan kons titusional yang menyelenggarakan pemerintahan dengan fungsi sebagai regulator maupun sebagai agent of change.

Sebagaimana dikemukakan di atas bahwa Good governance awalnya digunakan dalam dunia usaha (corporate) dan adanya desakan untuk menyusun sebuah konsep dalam menciptakan pengendalian yang melekat pada korporasi dan manajemen professionalnya maka diterapkan good corporate governance. Sehingga dikenal prinsip-prinsip utama dalam governance korporat yaitu: transparansi,

akuntabilitas, fairness, responsibilitas dan responsivitas.

Hipotesis

Sugiyono (2003:70) menyebutkan ; hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian”. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data dan harus diuji kebenarannya melalau pengujian hipotesis. Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. Hipotesis Nihil (Ho): “Tidak ada pengaruh positif antara pelaksanaan prinsip-prinsip Good Governance terhadap efektivitas kerja pegawai di Kantor UPT VI Dispenda Kota Medan ”.
2. Hipotesis Alternatif (Ha) : “Ada pengaruh positif antara pelaksanaan prinsip-prinsip Good Governance terhadap efektivitas kerja pegawai di Kantor UPT VI Dispenda Kota Medan”.

Defenisi Konsep

Menurut Singarimbun (1993:33) menyebutkan : “Konsep adalah istilah dan defenisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu social”. Berdasarkan uraian dan kerangka teori di atas konsep yang digunakan dalam penelitian ini.

Defenisi Operasional

Defenisi operasional merupakan petunjuk tentang bagaimana variable diukur. Adapun variable dalam penelitian ini terdiri dari dua variable, yakni satu variable bebas yaitu variable yang mempengaruhi dan satu variable terikat yaitu variable yang dipengaruhi.

a) Variabel Bebas (X)

Dalam penelitian ini adalah pelaksanaan prinsip-prinsip Good

Governance, yang diukur berdasarkan indikatornya yaitu:

1. Akuntabilitas.
2. Transparansi
3. Fairness
4. Partisipasi
5. Responsivitas atau ketanggapan
6. Efektif
7. StKeadilan
8. rategi Visi
9. Orientasi

Variabel Terikat (Y) = Efektivitas Kerja Pegawai Yaitu pencapaian atau hasil kerja dengan tingkat prestasi yang ditunjukkan pegawai Efektivitas Kerja Pegawai diukur melalui indicator sebagai berikut:

Menurut Campel yang dikutip Steers (1998:45) untuk mengukur efektivitas kerja ada beberapa variable yang bias dipergunakan yaitu:

1. Kesiagaan
2. Kemangkiran
3. Semangat kerja
4. Motivasi
5. Kepuasan kerja
6. Beban Pekerjaan
7. Waktu Menyelesaikan Tugas

METODE PENELITIAN

Bentuk penelitian yang digunakan penulis adalah bentuk penelitian korelasional, yaitu penelitian yang tujuannya adalah untuk melihat apakah ada pengaruh variable bebas (X) terhadap variable terikat (Y). Dalam hal ini untuk melihat apakah ada pengaruh pelaksanaan Good Governance terhadap efektivitas kerja pegawai di Kantor Unit Pelaksana Teknis VI Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Medan.

PEMBAHASAN

Sejarah Singkat Dinas Pendapatan Kota Medan

Pada mulanya Dinas Pendapatan Kota Medan adalah suatu Sub Bagian pada bagian Keuangan yang mengelolah bidang penerimaan dan pendapatan

Daerah. Pada sub ini tidak terdapat lagi sub seksi, karena pada saat ini Wajib Pajak/Wajib Pajak Retribusi yang berdomisili di daerah Kota Medan belum begitu banyak. Mempertimbangkan perkembangan pembangunan dan laju pertumbuhan penduduk di kota Medan melalui Peraturan Daerah sub bagian keuangan tersebut diubah menjadi bagian IX/Pendapatan. Pada Bagian IX/Pendapatan dibentuklah beberapa seksi yang mengelola Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah yang merupakan para Wajib Pajak / Wajib Pajak Retribusi Daerah Kota Medan.

Meningkatnya Pendapatan Daerah hendaknya tidak harus ditempuh dengan cara menaikkan tarif saja, tetapi yang lebih penting dengan memperbaiki atau menyempurnakan administrasi, sistem dan prosedur serta organisasi dari Dinas Pendapatan Daerah yang ada sekarang. Namun kondisi saat ini dirasakan tuntutan untuk perlunya meninjau kembali dan penyempurnaan Manual Pendapatan Daerah (MAPATDA) dimaksud seiring dengan tuntutan gerak pembangunan yang sedang berjalan terutama dari pola pendekatan yang selama ini dilakukan secara sektoral perlu diubah secara fungsional dan disesuaikan dengan kebijaksanaan pemerintah yang paling akhir dibidang Perpajakan, maka penyempurnaan telah dilaksanakan secara sungguh-sungguh sehingga berhasil disusun Manual Pendapatan Daerah (MAPATDA).

Adapun penyempurnaan dimaksudkan dituangkan di dalam :

1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 973/442 Tahun 1988 tanggal 26 Mei 1988, tentang Sistem dan Prosedur Perpajakan, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya serta pemungutan Pajak Parkir diseluruh Indonesia

a. Struktur Organisasi

Unit pelayanan Terpadu kota Medan merupakan bagian dari susunan organisasi Dinas Pendapatan Kota Medan yang langsung dibawah oleh DISPENDA KOTA MEDAN.

Dalam bab ini akan disajikan data yang diperoleh dari responden melalui penyebaran angket kepada sejumlah sampel penelitian yang jumlahnya 70 orang. Dari sejumlah orang angket yang disebarakan semuanya dapat dikumpulkan kembali dan telah terjawab dengan baik

Tabel 1. Jenis Kelamin Responden

	Frequency	Percent
Pria	25	49.0
Wanita	26	51.0
Total	51	100.0

Tabel menunjukkan terdapat 25 responden (49.0%) berjenis kelamin laki-laki. Terdapat 26 responden (51.0%) berjenis kelamin responden. Tabel menunjukkan mayoritas perempuan.

Tabel 2. Usia Responden

	Frequency	Percent
20-29	32	62.7
30-39	19	37.3
Total	51	100.0

Tabel menunjukkan terdapat 32 responden (62.7%) berusia 32 tahun. Terdapat 19 responden (37.3%) berusia 30-39 tahun. Tabel menunjukkan mayoritas usia responden merupakan usia yang produktif.

Tabel 3. Golongan / Pangkat Responden

	Frequency	Percent
pegawai negeri sipil	16	31.4
Honorer	35	68.6

	Frequency	Percent
pegawai negeri sipil	16	31.4
Honorer	35	68.6
Total	51	100.0

Tabel menunjukkan terdapat 16 responden (31.4%) mempunyai golongan sebagai pegawai negeri sipil. Terdapat 35 responden (68.6%) mempunyai golongan sebagai pegawai honorer.

Tabel 4. Lama Berkerja Responden

	Frequency	Percent
< 1-3	32	62.7
4-6	16	31.4
7-10 >	3	5.9
Total	51	100.0

Tabel menunjukkan terdapat 32 responden (62.7%) yang sudah bekerja selama < 1-3 tahun. Terdapat 16 responden (31.4%) yang sudah bekerja selama 4-6 tahun. Terdapat 3 responden (5.9%) yang sudah bekerja selama 7-10 > tahun. Tabel menunjukkan responden mayoritas merupakan responden yang bekerja

Variabel Good Governance (X)

Tabel 5. Peraturan DISPENDA Memihak Kepada Kepentingan Masyarakat

	Frequency	Percent
Selalu	9	17.6
Jarang	19	37.3
sangat jarang	17	33.3
Pernah	6	11.8
Total	51	100.0

Tabel menunjukkan terdapat 9 responden (17.6%) menyatakan bahwa peraturan Dispenda kota medan selalu memihak kepada kepentingan

masyarakat. Terdapat 19 responden (37.7%) menyatakan bahwa peraturan Dispenda kota medan jarang memihak kepada kepentingan masyarakat. Terdapat 17 responden (33.3%) menyatakan peraturan Dispenda kota medan sangat jarang memihak kepada kepentingan masyarakat kota medan. Terdapat 6 responden (11.8%).

Tabel 6. Program Kerja Dibuat Untuk Melayani Masyarakat

	Frequency	Percent
Selalu	23	45.1
Jarang	16	31.4
sangat jarang	9	17.6
Pernah	1	2.0
tidak pernah	2	3.9
Total	51	100.0

Tabel menunjukkan terdapat 23 responden (45.1%) menyatakan program kerja Dispenda kota medan selalu dibuat untuk melayani masyarakat. Terdapat 16 responden (31.4%) menyatakan program kerja Dispenda kota medan jarang dibuat untuk melayani masyarakat. Terdapat 9 responden (17.6%) menyatakan program kerja Dispenda kota medan sangat jarang dibuat untuk melayani masyarakat. Terdapat 1 responden (2.0%)

Analisis Tabel Silang Hubungan Antara Melayani Masyarakat Sebaik Mungkin dan Menyelesaikan Pekerjaan Selalu Mencapai Sasaran

	Menunda Pekerjaan				
	Selalu	Jarang	Jarang	Pernah	Tidak pernah
prinsip efisien	4	6	6	4	2
selalu	3	0	4	2	1

jarang	5	4	2	0	0	11
sangat jarang	3	2	1	0	0	6
pernah	0	1	0	1	0	2
tidak pernah						
Total	15	13	13	7	3	51

Uji Hipotesis

Uji Hipotesis

Correlations

		Good Governance	Efektifitas Kerja
Good Governance	Pearson Correlation	1	-.197
	Sig. (2-tailed)		.167
	N	51	51
Efektifitas Kerja	Pearson Correlation	-.197	1
	Sig. (2-tailed)	.167	
	N	51	51

PENUTUP

Kesimpulan

1. Pelaksanaan prinsip-prinsip Good Governance di Unit Pelayanan Terpadu VI Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan dikategorikan baik. Akan tetapi pimpinan organisasi harus mampu mengkoordinasi bawahan agar pelaksanaan kegiatan organisasi dapat dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi dan peraturan serta kebijaksanaan organisasi.
2. Efektivitas kerja pegawai di Unit Pelayanan Terpadu VI Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan dikategorikan baik / efektif.
3. Ada pengaruh antara pelaksanaan prinsip-prinsip Good Governance terhadap efektivitas kerja pegawai di Unit Pelayanan Terpadu VI Dinas Pendapatan Daerah Kota

Medan. Hal ini memberi gambaran bahwa apabila pelaksanaan prinsip-prinsip Good Governance ditingkatkan akan meningkatkan efektivitas kerja pegawai. Besar pengaruh pelaksanaan prinsip-prinsip Good Governance terhadap efektivitas kerja pegawai di Unit Pelayanan Terpadu VI Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan sebesar 42.2%.

Saran

Berikut ini penulis akan memberikan saran yang bermanfaat bagi perusahaan. Adapun saran-saran yang penulis kemukakan adalah sebagai berikut:

Agar Pimpinan di Unit Pelayanan Terpadu VI Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan terus melakukan peningkatan SDM agar SDM yang ada memiliki profesionalisme dan etika serta moralitas yang tinggi, sehingga SDM dalam setiap bertindak selalu berlandaskan etika dan moral.

Pimpinan organisasi harus melakukan strategi manajemen terhadap SDM yang ada dengan terlebih dahulu melakukan analisa SDM yang kurang potensial sehingga lebih mudah menangani dan menempatkan posisi pegawai sesuai potensinya.

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, Suharsimi, 2001, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta, Rineka Cipta.
 Effendi, Sofian, 1996, *Membangun Martabat Manusia ; Peranan Ilmu-Ilmu Sosial dalam Pembangunan*, Yogyakarta, Gajah Mada University.
 Handoko. T. Hani, 1991. *Manajemen Personalialia dan Sumber Daya*

Manusia. Cetakan Pertama. Yogyakarta, Liberti.
 Mardiasmo, 1998, *Otonomi Daerah dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta : Andy Offset.
 Nugroho, D, Riant, 2004, *Kebijakan Publik, Formulasi Implementasi dan Evaluasi*, Jakarta. Gramedia.
 Purwanto, Erwan Agus. 2005. *Pelayanan Publik Partisipatif*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
 Sarwoto 1990, *Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
 Siagian Sondang. P, 1991, *Organisasi Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi*, Gunung Agung, Jakarta.
 Singarimbun, Masri, dan Sofyan Effendi, 1993, *Metode Penelitian survai*, Jakarta. LP3ES.
 Sudjana, 1992. *Statistika*, Bandung. Tarsito.
 Sugiyono, 2003, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung. Alfabeta.
 Sumodiningrat, Gunawan. 1999. *Pemberdayaan Masyarakat & JPS*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
 Steers, Richard M, 1998, *Efektivitas Organisasi*, Terjemahan, Jakarta, PPM, Erlangga.
 Tangkilisan, Hessel Nogi S, 2005, *Manajemen Publik*, Jakarta, Grassindo.
 Wahab, Solichin Abdul, 1990, *Analisis Kebijakan Negara*, Jakarta : Rineka Cipta.
 Wijaya, Amin Tunggal, 1993, *Manajemen suatu Pengantar*, Cetakan Pertama, Rineka Cipta Jaya, Jakarta.
 Winarno, Budi, 2002, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Yogyakarta, Media Presindo.